

DAMPAK PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN-KOREA SELATAN FREE TRADE AREA (AKFTA) TERHADAP INDONESIA TAHUN 2007-2011

Oleh:

Era Rahmawati

(era.rahmawati0375@student.unri.ac.id)

Pembimbing : Drs. Tri Joko Waluyo, M.Si

Bibliografi : 5 Jurnal, 18 Buku, 21 Website.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is about trade relations between Indonesia and South Korea within the framework of AKFTA. Like other economic cooperation that attempts to realize free trade, cooperation, AKFTA cooperation aims to facilitate the flow of goods and capital. This cooperation runs international trade principles promoted by the global trade regime of the World Trade Organization (WTO).

The purpose of the research is to see how the impact of the trade agreement AKFTA of Indonesia. This study used a qualitative research method. In this research, the author uses liberalist perspective with international cooperate theory with level analysis in nation-state. And data collection technique through the study of literature (Library Research).

The result showed that the cooperation of the Free Trade Area (FTA) within the scope of ASEAN-South Korea Free Trade Area (AKFTA) involving Indonesia had a positive impact on the Indonesian economy, because in this case can be seen from the increase in the value of Indonesia's exports to South Korea from year to years (2007-2011), then the increase of investment of the investors from South Korea who invest capital in Indonesia, and also have a positive impact on the development of Indonesia, because South Korea has provided monetary assistance for the development of Indonesia.

Keywords: ASEAN-South Korea Free Trade Area (AKFTA), Free Trade Area (FTA), Economy

I. Pendahuluan

Penelitian ini merupakan studi mengenai dampak perjanjian perdagangan barang ASEAN-Korea Selatan *free trade area* (AKFTA) terhadap Indonesia tahun 2007-2011.

Saat ini sebagian besar negara-negara di dunia berpendapat bahwa perdagangan bebas (*free trade*) merupakan kebijakan yang harus mereka tempuh sebagai jalan menuju kesejahteraan. Hal yang sama dipraktekkan oleh negara

negara di regional Asia Tenggara, norma-norma perdagangan bebas tersebut diupayakan oleh negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi regional *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) untuk segera terwujud melalui berbagai perjanjian kerjasama. Salah satu kerjasama yang dijalin oleh ASEAN dalam rangka mewujudkan perdagangan bebas tersebut adalah dengan Korea Selatan. Kerjasama tersebut

kemudian kita kenal dengan nama *ASEAN-Korea Selatan Free Trade Area* (AKFTA).

Kerjasama AKFTA ini juga bertujuan untuk memperlancar arus barang dan modal. Kerjasama ini menjalankan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang dipromosikan oleh rezim perdagangan global *World Trade Organization* (WTO). Ciri utama perdagangan bebas adalah menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, serta perubahan regulasi yang memberi keleluasaan pada modal untuk diinvestasikan.

Awal dari kerjasama AK-FTA yaitu ketika pemerintah Korea Selatan dan pemerintah negara-negara anggota ASEAN menginisiasi sebuah forum dialog. Dari forum dialog itulah kemudian berbagai rencana kerjasama mulai dibangun hingga Korea Selatan akhirnya menjadi salah satu negara yang menjadi partner dialog ASEAN pada tahun 1991. Kerjasama antara kedua pihak kemudian berlanjut pada pertemuan KTT ASEAN-Korea tanggal 29 November 2004 di Vientin, Laos. Para Kepala Negara atau Pemerintahan ASEAN dan Korea Selatan menyepakati "*Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership between ASEAN and Korea, establishing ASEAN-Korea Free Trade Area*" sebagai landasan hukum bagi pembentukan *ASEAN and Korea Free Trade Area Framework Agreement*.

Persetujuan Penyelesaian Sengketa AKFTA selanjutnya ditandatangani para Menteri Ekonomi ASEAN dan Korea pada tanggal 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Persetujuan Perdagangan Barang AKFTA ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sedangkan Persetujuan Jasa AKFTA ditandatangani pada saat KTT ASEAN di Singapura tahun 2007 dan Persetujuan Investasi ASEAN-Korea Selatan ditandatangani pada KTT ASEAN Korea

Selatan pada bulan Juni 2009 di Jeju Island, Korea. AKFTA telah menjadi sebuah persetujuan FTA.

Setelah perjanjian AKFTA ini berlangsung hampir lima tahun, perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan analisis terhadap kontribusi dari perjanjian tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Perjanjian perdagangan barang AKFTA merupakan salah satu sektor penting dari perjanjian AKFTA yang perlu dilakukan evaluasi atau *impact assessment*. Dalam hal ini, penilaian dampak suatu FTA perlu dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan suatu FTA dapat dipenuhi.

Pendapatan nasional merupakan salah satu dari tiga indikator untuk menghitung dampak dari suatu FTA terhadap suatu negara dari aktivitasnya dalam perdagangan internasional. Dalam model Keynesian empat sektor, salah satu komponen pendapatan nasional adalah kontribusi ekspor.

Kerangka Teori

Penelitian ini dibangun atas tiga pondasi utama yakni, Perspektif *Liberalisme* dengan tingkat dan unit analisis yang digunakan adalah negara-bangsa (*Nation-State*) dan menggunakan teori kerjasama Internasional. Secara teoritik, tiga pondasi utama ini yang nantinya akan menjawab bagaimana dampak perjanjian perdagangan barang *ASEAN-Korea Selatan free trade area* (AKFTA) terhadap Indonesia tahun 2007-2011.

Perspektif *Liberalisme* dalam ilmu hubungan internasional memiliki asumsi dasar yakni bahwa kaum liberal umumnya mengambil pandangan positif tentang sifat manusia. Mereka memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia mereka dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Pemikiran kaum liberal sangat erat hubungannya dengan kemunculan negara konstitusional modern. Kaum liberal berpendapat bahwa modernisasi adalah proses yang

menimbulkan kemajuan dalam banyak bidang kehidupan. Proses modernisasi memperluas ruang lingkup bagi kerjasama lintas batas internasional. Kemajuan berarti kehidupan yang lebih baik bagi paling tidak mayoritas individu. Manusia memiliki akal pikiran, dan ketika mereka memakainya pada masalah-masalah internasional, kerjasama yang lebih besar akan menjadi hasil akhir.¹

Penulis menggunakan tingkat dan unit analisis negara-bangsa (*Nation-State*). *Nation state level analysis* mempercayai bahwa negara adalah aktor dominan dan yang paling kuat dalam percaturan interaksi di pentas dunia. Negara relatif bebas untuk menentukan kebijakan apa yang harus diikuti. Walaupun setiap hubungan dengan realitas sistem dunia, namun pada hakikatnya negara kecil dan paling lemah sekalipun adalah aktor yang mengendalikan sistem internasional.²

Penulis menggunakan teori kerjasama internasional. Teori merupakan seperangkat konsep konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memperinci hubungan sebab akibat yang terjadi. Teori sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah, karena kerangka dasar teori inilah yang nantinya dipergunakan oleh penulis sebagai dasar penulisan teori ini.³ Teori dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau kerangka berfikir yang mengandung penjelasan, ramalan, atau anjuran pada setiap bidang penelitian.⁴

Hubungan antar negara dapat mempercepat proses perkembangan ekonomi. Hal ini sangat dirasakan sekali

pentingnya bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Kerjasama negara-negara maju dapat membahas masalah-masalah bidang tertentu. Dalam memenuhi semua kebutuhannya, suatu negara perlu bekerjasama dengan negara lain atau memerlukan kerjasama ekonomi internasional. Suatu negara di dunia, walaupun sudah modern wilayah luas dan sumber daya alamnya melimpah, tidak akan pernah mampu ataupun tidak akan pernah bisa hidup mandiri tanpa adanya hubungan ataupun berhubungan dengan negara lain. Pada saat ini di zaman yang sudah modern kebudayaan umat manusia di suatu negara, justru akan semakin tinggi tingkat ketergantungannya terhadap negara lain, dan melalui kerjasama internasional antar negara dalam berbagai bidang.

Penulis menggunakan teori kerjasama internasional, karena semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, karena hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.

Menurut K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri

¹Robert Jackson.Georg Sorensen, 2013.*Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan edisi kelima*,Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hal. 175-178

²John T. Raoukre, *International Politics on The World Stage*. USA, 2001. Hlm 81-82

³ Burchill, Scott and Linklater, Andrew.1996. “*Theories of International Relations*”

⁴ Jack C.Plano dan Robert E.Rigs. Helena S. Robin *Kamus Analisis Politik*, Jakarta:Rajawali pers. 1985 hlm 266

perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak.⁵

Kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa “kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional”.⁶

Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara dengan negara lain. Kerjasama tersebut dapat terjadi hanya melibatkan dua negara saja maupun lebih. Karena adanya keterkaitan, interaksi, dan pengaruh antara faktor-faktor ekonomi dan politik dalam ruang lingkup hubungan internasional maka terdapat dua variabel pokok dalam fenomena politik internasional, yakni bahwa hakekat aktifitas ekonomi adalah pasar dan hakekat aktifitas politik adalah pasar.⁷

Kerjasama ekonomi internasional dapat berjalan dengan harmonis apabila tiap negara yang terlibat dapat menikmati keuntungannya. Selain itu, kerjasama tersebut juga harus didasari rasa ingin membantu negara lain. Mereka yang terlibat dalam kerjasama ekonomi internasional harus memahami tujuan diadakannya kerjasama tersebut. Kerjasama ini dapat dilakukan negara maju dengan negara berkembang, atau antara sesama negara maju. Kerjasama antara negara maju dengan negara

berkembang diwujudkan dalam bentuk tukar-menukar barang mentah dengan barang jadi, pertukaran barang mentah dengan modal tenaga ahli. Sedangkan kerjasama antar sesama negara maju diwujudkan dalam bentuk pertukaran tenaga ahli serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bentuk kerjasama internasional adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama antar dua negara.⁸

Penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana penulis akan menjelaskan tentang bagaimana Dampak Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) Terhadap Indonesia. Metode penelitian ini akan disesuaikan dengan aturan akademis sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik.

Adapun penelitian dalam metode kualitatif tidak menekankan pada kuantum atau jumlah, jadi lebih menekankan pada segi kualitas secara alamiah karena menyangkut pengertian, konsep, nilai serta ciri-ciri yang melekat pada objek penelitian lainnya. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan suatu penelitian yang tidak melakukan perhitungan-perhitungan dalam melakukan justifikasi epistemologis.⁹

Selanjutnya, tulisan ini akan dikembangkan melalui teknik pengumpulan data *library research*, penulis memanfaatkan buku-buku, artikel-artikel, jurnal dan berita-berita yang berasal dari berbagai media. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan fasilitas internet dalam memperoleh data tambahan untuk penelitian ini.

Penulis memberikan batasan penelitian, pertama, penelitian ini difokuskan pada dampak perjanjian

⁵ K.J Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II*, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1998, hal. 652-653

⁶ Koesnadi Kartasasmita, *Administrasi Internasional*, Lembaga Penwebitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1997, hal.19

⁷ Marbun, Bn.1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 101

⁸ Salvatore, Dominick. 1992. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga, hlm.25

⁹ DR.Kaelan, M.S., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, hal.5

perdagangan barang ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) terhadap Indonesia. Penulis tertarik hanya mengkaji Indonesia yaitu karena apabila dilihat dari hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, kedua negara ini telah menjalin hubungan bilateral dalam bidang ekonomi sudah cukup lama sebelum adanya perjanjian perdagangan ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) ini, oleh karena itu penulis tertarik untuk melihat sejauh mana dampak adanya perjanjian perdagangan ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) ini apakah menguntungkan bagi Indonesia setelah adanya perjanjian ini atau bahkan sama saja sebelum adanya perjanjian perdagangan ini.

Kedua, penelitian ini difokuskan pada tahun 2007 – 2011, karena pada tahun tersebut terlihat jelas bahwa pendapatan Indonesia meningkat, hal ini dapat dilihat dari nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan yang cukup meningkat dengan adanya kerangka perjanjian perdagangan ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA).

II. ISI

ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dengan Korea Selatan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak AKFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Korea Selatan dalam MoU dapat diketahui bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam kerjasama ini.

Secara umum, aktor utamanya dapat diklasifikasikan menjadi dua pihak saja yaitu ASEAN dan pemerintah Korea Selatan. Tetapi ketika berbicara ASEAN berarti akan mendefinisikan aktornya sebagai negara-negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Filipina, dan Myanmar. Dalam jalannya kerjasama ini pemerintah negara-negara yang disebutkan di atas adalah aktor utama dalam kerjasama ini. Selain pemerintah, karena ini adalah kerjasama dalam bidang perdagangan maka peran pihak swasta yang banyak terlibat langsung dalam urusan ini juga menjadi aktor yang patut dipertimbangkan dalam kerjasama ini. Pihak terakhir yang terlibat dalam kerjasama ini adalah WTO. Hal ini terjadi karena pemerintah-pemerintah yang menginisiasi kerjasama ini menyepakati untuk menggunakan aturan-aturan di WTO dalam pelaksanaan kerjasama ini.

Hubungan kerjasama ASEAN dengan Korea Selatan secara resmi diawali pada pertemuan para pemimpin di KTT ASEAN-Korea Selatan pada bulan Oktober tahun 2003 di Bali. Pada saat itu kedua belah pihak menyetujui untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas atau *Free Trade Area*, yang kemudian kerjasama ini dikenal dengan nama ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA).

ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) merupakan perjanjian ataupun kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Korea Selatan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Korea Selatan.

Negosiasi pada ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) dimulai pada awal tahun 2005 dan selanjutnya kerangka kerjasama ekonomi komprehensif antara ASEAN-Korea Selatan ditandatangani oleh ASEAN dan Korea Selatan pada tanggal 13 Desember 2005. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk membentuk ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) untuk memperkuat dan meningkatkan ekonomi, perdagangan dan kerjasama investasi antara negara anggota ASEAN dan Korea Selatan dengan cara liberalisasi dan mempromosikan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan transparan, liberal dan rezim investasi. Perjanjian ini juga bertujuan untuk mengembangkan langkah-langkah yang tepat untuk kerjasama ekonomi dan integrasi, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari negara-negara anggota ASEAN yang baru membantu dalam kesenjangan pembangunan dan membangun kerangka koperasi untuk lebih memperkuat hubungan ekonomi antara negara-negara.

Untuk mencapai tujuan dari persetujuan kerangka kerja, perdagangan ASEAN-Korea Selatan dalam perjanjian barang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006 oleh negara-negara anggota ASEAN, dan Korea Selatan. Thailand menyetujui ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) pada Oktober 2009. Setelah *Trade in Goods Agreement*, perdagangan jasa ASEAN-Korea Selatan ditandatangani pada 21 November 2007 dan perjanjian investasi ASEAN-Korea Selatan ditandatangani pada 2 Juni 2009. Perjanjian tentang mekanisme penyelesaian sengketa antara ASEAN dan Korea Selatan juga di tandatangi pada 13 Desember 2005, yang menyediakan mekanisme untuk setiap sengketa yang mungkin timbul antar kedua pihak dalam

perdagangan bebas ASEAN-Korea Selatan.¹⁰

Dampak ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) Terhadap Indonesia

Hubungan bilateral yang saling mengisi untuk menjalin sebuah hubungan internasional antara suatu negara dengan negara yang lainnya tidak mudah, sangat banyak faktor-faktor yang harus dilalui dari masalah dalam negara ataupun dari negara yang akan diajak untuk bekerjasama. Seperti pada sebelum tahun 2011, salah satu faktor yang mempengaruhi dalam hubungan antar negara di dunia internasional adalah faktor politik dan keamanan, oleh sebab itu kedua faktor ini merupakan salah satu penghambat kelancaran suatu negara untuk bekerjasama dengan negara yang lain.

Dampak sebenarnya dari pemberlakuan *Free Trade Area* (FTA) mungkin sangat berbeda dari proyeksi sebelumnya. Setiap kerjasama yang terjalin antar negara pasti akan memberikan dampak diantara kedua negara terutama pada perekonomian suatu negara. Dalam hal ini kerjasama yang telah disepakati antara ASEAN dan Korea Selatan dalam kerangka perjanjian perdagangan ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) memberikan dampak terhadap Indonesia terutama pada perekonomiannya, yang mana Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung di dalam ASEAN.

Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian kerja sama bilateral dan multilateral memiliki pengaruh yang beragam. Pengaruh tersebut digunakan Indonesia untuk memperkuat posisi Indonesia dalam meningkatkan ekspor, meningkatkan kepercayaan investor, membantu meningkatkan daya saing ekonomi, dan meningkatkan neraca perdagangan Indonesia ke Korea Selatan.

¹⁰ Background of AKFTA. Di akses melalui <http://akfta.asean.org> pada 11-02-2017 pukul 09:36

Peningkatan Nilai Ekspor Indonesia Ke Korea Selatan

Kegiatan ekspor suatu negara merupakan salah satu indikator untuk membantu menambah ataupun membantu meningkatkan pendapatan nasional ataupun perekonomian suatu negara menuju perekonomian yang lebih maju lagi khususnya dalam hal ini yakni ekspor Indonesia ke Korea Selatan dalam skema ataupun dalam kerangka perjanjian perdagangan ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA). Dalam kegiatan ekspor Indonesia ke Korea Selatan dalam kerangka ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) ini, dapat membantu meningkatkan perdagangan internasional Indonesia ke Korea Selatan, ataupun memberikan peluang yang besar terhadap Indonesia dalam memasuki pasar Korea Selatan, supaya Indonesia bisa lebih mempromosikan produk-produk Indonesia khususnya dalam hal ini bahan-bahan baku Indonesia ataupun sumber daya alam Indonesia untuk di olah ataupun di produksi.

Dampak dengan diberlakukannya perjanjian perdagangan ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) sangat mempengaruhi pada total nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan selama tahun 2007-2011 setelah berlakunya skema *preferential tariff* atau tingkat tarif yang di perluas ke negara-negara mitra yang telah sepakat atau telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Area* atau FTA).

Nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan sebagai dampak setelah berlakunya ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni dari tahun 2007-2011. Pada bulan Juli 2007 hingga bulan Juni 2008 total nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan sebesar 4,188,068 US\$ (empat juta seratus delapan puluh delapan ribu enam puluh delapan USD), pada bulan Juli 2008 hingga bulan Juni 2009 sebesar 4,269,207 US\$ (empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus

tujuh USD), kemudian meningkat pada bulan Juli 2009 hingga bulan Juni 2010 sebesar 6,254,087 US\$ (enam juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan puluh tujuh USD) dan meningkat pada bulan Juli 2010 hingga bulan Juni 2011 yakni sebesar 7,250,595 US\$ (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima USD).

Kemudian adapun total nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan dalam skema ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) setelah berlakunya *preferential tariff* yaitu periode Juli 2007-Juni 2011 adalah sebesar US\$ 21,961,957.000, Sedangkan bila tidak ada skema *preferential tariff* atau tingkat tarif yang di perluas ke negara-negara mitra yang telah sepakat atau telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Area* atau FTA) total nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan hanya mencapai US\$ 17,342,847,080.¹¹

Peningkatan Masuknya Investasi Korea Selatan ke Indonesia

Kerjasama ekonomi antar negara dapat menjadi cara menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara, khususnya dalam hal ini kerjasama ekonomi setelah berlakunya perjanjian perdagangan ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA). Investasi, khususnya investasi asing merupakan faktor penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara khusus dalam hal ini negara Indonesia.

Banyaknya investor yang mau menginvestasikan modalnya ataupun menanamkan modalnya di suatu negara dapat menjadi peluang bagi negara tersebut untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan negara tersebut khususnya dalam hal ini yakni negara Indonesia dengan Korea Selatan dalam kerangka ASEAN-Korea Selatan

¹¹ Diakses melalui www.kemenkeu.go.id pada 24-03-2017 pukul 13:01

Free Trade Area (AKFTA). Karena dengan banyaknya para investor yang menanamkan modalnya di suatu negara maka akan dapat membantu untuk meningkatkan perekonomian suatu negara khususnya dalam hal ini yakni negara Indonesia.

Selain itu, banyaknya investasi dapat juga menambah atau membuka lapangan pekerjaan yang baru, sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa penduduk di Indonesia masih banyak yang memiliki status pengangguran atau belum mempunyai pekerjaan, ataupun banyak penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri. Maka dengan banyaknya para investor Korea Selatan yang menanamkan modalnya di Indonesia dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Dan juga dengan banyaknya investasi atau investor yang menanamkan modalnya di Indonesia yang berasal dari Korea Selatan dapat mengurangi angka penduduk yang bekerja di luar negeri dan akan lebih banyak penduduk atau masyarakat yang bekerja di dalam negeri.

Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih menarik dan meningkatkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia.

Dalam konteks ini, Indonesia mendapat banyak keuntungan dari banyaknya investor dari Korea Selatan yang masuk dan menanamkan investasinya ataupun yang menanamkan modalnya di

Indonesia setelah berlakunya perjanjian perdagangan ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA), dengan kata lain investasi tersebut banyak membuka lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga dapat menekan angka pengangguran di Indonesia yang cukup signifikan. Berdasarkan data BKPM bahwasannya setelah adanya perjanjian ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) nilai investasi Korea Selatan pada tahun 2010 sebesar 328,5 juta US\$ dan pada tahun 2011 nilai investasi Korea Selatan di Indonesia meningkat yakni sebesar 1.218,7 juta US\$. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan terhadap nilai investasi atau investor Korea Selatan yang menanamkan modalnya di Indonesia.¹²

Dengan terbinanya hubungan ekonomi Indonesia-Korea Selatan yang erat selama bertahun-tahun diantara kedua negara, masyarakat Korea Selatan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat terutama pada peningkatan pendapatan nasional Indonesia yang juga dilihat dari peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan khususnya ekspor barang Indonesia ke Korea Selatan yakni berupa bahan-bahan baku ataupun sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Investasi Korea Selatan di Indonesia terutama pada sektor industri elektronik, telekomunikasi, konstruksi, otomotif, pertambangan, migas, air bersih, perbankan dan perhotelan, pada tahun 2009-2011 terdapat investasi yang bernilai miliaran US dollar dari perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan yang berinvestasi di Indonesia yakni diantaranya seperti: Pertama, perusahaan *Pohang Iron and Steel Corporation* (POSCO) yakni merupakan perusahaan terbesar industri baja di Korea Selatan, Kedua, perusahaan

¹²Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Negara 2015. Di akses melalui <https://data.go.id/dataset/perkembangan-realisasi-investasi-pma> Pada 13-04-2017 pukul 08:06

Hankook Tire yakni merupakan perusahaan ban mobil terbesar di Korea Selatan, Ketiga, Lotte Group yakni merupakan perusahaan di bidang makanan, minuman, dan lainnya, dan Keempat, Cheil Jedang Group yakni merupakan perusahaan industri kimia dasar.

Hal tersebut dengan banyaknya para investor Korea Selatan yang menanamkan modalnya di Indonesia itu membuktikan adanya kepercayaan yang tinggi dari para investor Korea Selatan tersebut kepada Indonesia. Keputusan investasi tersebut diikuti bukan hanya oleh perusahaan afiliasia atau perusahaan cabang dan perusahaan vendor dari perusahaan besar Korea Selatan, tetapi juga oleh perusahaan Korea Selatan lainnya.

Dengan banyaknya investasi atau para investor dari Korea Selatan yang menanamkan modalnya di Indonesia, hal tersebut dapat membantu menambah ataupun meningkatkan pendapatan nasional Indonesia, yang artinya itu berarti akan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia itu sendiri, karena semakin banyaknya para investor dari luar akan dapat membantu meningkatkan nilai perekonomian suatu negara dalam hal ini khususnya dalam hal ini perekonomian negara Indonesia.

Kemudian hal tersebut juga menunjukkan bahwa semakin banyak investasi yang masuk ke suatu negara, akan menandakan bahwa negara tersebut mempunyai keunggulan atau daya saing dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan demikian berdasarkan uraian beberapa investasi dari Korea Selatan yang ada di Indonesia itu artinya bahwa dengan adanya atau setelah berlakunya skema perjanjian perdagangan ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) dapat memperluas ataupun semakin banyaknya

para Investor dari Korea Selatan yang menanamkan modalnya di Indonesia.¹³

Peningkatan Bantuan Keuangan dari Korea Selatan ke Indonesia

Kerja sama ekonomi antarnegara khususnya dalam hal ini dalam skema atau kerangka ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, salah satunya di bidang keuangan. Melalui kerja sama ini Indonesia memperoleh bantuan berupa pinjaman keuangan dari Korea Selatan dengan kerangka *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) yakni kesepakatan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan yang menyepakati program kerjasama keuangan yang ditujukan untuk mendukung pembangunan di sektor industri dan upaya mewujudkan stabilitas atau kestabilan ekonomi Indonesia.

Kerjasama dana pengembangan ekonomi atau *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) didirikan oleh pemerintah Korea Selatan pada tanggal 1 Juni 1987, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi antara Korea Selatan dan negara-negara berkembang. *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) membantu negara-negara berkembang dengan cara menyediakan pembiayaan untuk membantu negara-negara dalam mencapai pembangunan ekonominya.

Dewan manajemen keuangan adalah dewan yang tertinggi dalam pembuatan kebijakan otoritas dari *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) tersebut. Arah pengoperasian atau pelaksanaan *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) dan asumsi tanggung jawab dalam membuat kebijakan pokok yakni berhubungan dengan Kementerian Strategi dan Keuangan (*Ministry of Strategy and Finance* atau

¹³Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPM Tahun 2010. Di akses melalui www.bkpm.go.id pada 31-03-2017 pukul 20:18

MOSF). Dipercayakan oleh *Ministry of Strategy and Finance* atau MOSF, Ekspor-Impor Bank of Korea Selatan (Korea Eximbank) bertanggung jawab untuk mengelola operasi *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) seperti penilaian proyek, pelaksanaan perjanjian pinjaman, penyaluran kredit, dan evaluasi proyek.

Pada tanggal 1 Januari 2010, Korea Selatan bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development* atau OECD) yang merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Komite Bantuan Pembangunan (*Development Assistance Committee* atau DAC) menyediakan lebih dari 80% dari bantuan pembangunan resmi global. *Official development assistance* atau ODA merupakan bantuan pembangunan resmi adalah statistik yang disusun oleh komite bantuan pembangunan dari organisasi untuk kerjasama dan pengembangan ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development* atau OECD), untuk mengukur bantuan dan juga merupakan sebagai pendonor organisasi internasional menjadi anggota dari organisasi internasional tersebut yakni *Development Assistance Committee* atau DAC. Korea Selatan adalah negara Asia kedua setelah Jepang yang telah bergabung sebagai anggota dalam *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) tersebut.

Korea Selatan Sebagai negara pertama di dunia yang berubah dari negara terkecil yang kemudian negara tersebut dikembangkan sebagai negara anggota *Development Assistance Committee* atau DAC. Korea Selatan sekarang terlihat negara yang maju untuk membuat kontribusi yang lebih besar untuk pembangunan global. Saat ini, Korea Selatan adalah 16 penyedia *Official development assistance* atau ODA terbesar di dunia. Korea Selatan menawarkan dana

dengan total USD 1.755 juta di ODA pada tahun 2013, terhitung *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) mengambil langkah lebih lanjut untuk lebih efektif dalam mempromosikan pembangunan suatu negara. kerjasama dengan negara-negara mitra, yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan di negara-negara berkembang, tantangan yang menakutkan dalam menghadapi masyarakat internasional.

Pada tahun 2014, *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) memiliki komitmen pinjaman untuk tahun tersebut mencapai KRW (Won Korea Selatan) 1.414 miliar (USD 1.273 juta), termasuk komitmen untuk proyek infrastruktur skala besar di sektor-sektor seperti transportasi dan pengembangan sumber daya air, mencapai pinjaman kumulatif komitmen KRW (Won Korea Selatan) 11.648 miliar yakni pada tanggal 31 Desember 2014. Porsi terbesar dari komitmen pada akhir 2014 diperluas ke negara-negara Asia, yang mencerminkan Korea Selatan yang dalam hubungan ekonominya dan hubungan diplomatiknya dengan wilayah tersebut. komitmen pinjaman ke negara-negara Asia menyumbangkan 66,7% dari total kredit *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF).

Negara Afrika mengambil tempat kedua yang menerima pinjaman sebesar 20,8% dari total komitmen yang ada. Dalam hal distribusi sektoral, *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) berkomitmen 35,4% dari total komitmen kumulatif untuk transportasi, 17,1% untuk pasokan air dan sanitasi, 11,3% untuk kesehatan, 9,5% untuk energi, 6,9% untuk pendidikan, 6,7%, untuk administrasi publik, dan 6,5% untuk komunikasi.

Economic Development Cooperation Fund (EDCF) memberikan syarat yang lunak terhadap Indonesia. Dalam hal ini pinjaman keuangan *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) dengan syarat lunak yang artinya

bahwa Korea Selatan memberikan pinjaman keuangan kepada Indonesia dengan syarat yang tidak terlalu rumit atau dengan syarat yang tidak terlalu sulit untuk Indonesia. Adapun syarat lunak pinjaman dalam kerangka *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) yakni meliputi :

1. Tingkat bunga pertahun 1,5%
2. Masa pembayaran kembali selama 30 tahun (termasuk masa tenggang 10 tahun)
3. Kontrak proyek efektif sejak dilaksanakan penandatanganan dan di beri tenggang waktu hingga 18 bulan
4. Pencairan dana efektif akan dilaksanakan sejak penandatanganan dan diberi tenggang waktu hingga 2 tahun
5. Dalam kondisi tertentu pihak peminjam gagal melakukan pembayaran pada tahun tertentu, maka jumlah pinjaman yang tidak terbayar pada tahun itu bunganya akan menjadi 20%.

Dengan demikian, adanya pinjaman keuangan tersebut otomatis akan dapat meningkatkan keuangan negara khususnya dalam hal ini negara Indonesia. Kerjasama keuangan dalam kerangka *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) yang telah ditandatangani tersebut akan memprioritaskan pada tiga sektor yakni teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur dan *green growth*

Green growth yakni suatu program pada *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) yang menawarkan insentif untuk proyek-proyek Hijau yang melibatkan energi terbarukan, efisiensi energi dan inisiatif ramah lingkungan, preferensial seperti menurunkan suku bunga dan melakukan studi kelayakan (*Feasibility Study* atau F / S) dalam bentuk hibah, adapun beberapa sektor studi kelayakan ini yakni sektor pertanian (perkebunan dan kehutanan), sektor pertambangan, sektor industri pabrikan

dan sektor lainnya. Proyek pertumbuhan hijau dalam *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) menyumbang sebesar 27% dari total komitmen yang ada. Sebelumnya, pada periode tahun 2007-2009, total komitmen kerjasama keuangan yang dilakukan senilai US\$ 149,9 juta.

Bantuan keuangan dalam kerangka *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) ini diberikan dalam kerangka kerjasama pembangunan guna membiayai pelaksanaan sejumlah proyek-proyek pembangunan di Indonesia dalam kurun waktu 2007 sampai akhir 2009. Selama kurun waktu tersebut, pemerintah Korea Selatan mengalokasikan atau penentuan banyaknya bantuan pinjaman lunak sebesar US\$ 300.000.000,- (\pm Rp.2,7 triliun) dan dapat ditingkatkan tidak lebih dari US\$ 370.000.000,- (\pm Rp.3,3 triliun). Setiap tahunnya Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan berupaya akan menggunakan dana komitmen 1/3 dari jumlah komitmen, sehingga sebelum akhir tahun dana telah dialokasikan atau telah disesuaikan ke semua proyek-proyek pembangunan di Indonesia.¹⁴

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya mengenai dampak perjanjian perdagangan barang ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) terhadap Indonesia tahun 2007-2011 maka dapat disimpulkan yakni bahwasannya Indonesia mendapatkan keuntungan dari adanya ASEAN-Korea *Free Trade Area* (AKFTA), hal tersebut dapat dilihat dari keuntungan dalam peningkatan nilai ekspor Indonesia-Korea Selatan yaitu pasca penandatanganan kerjasama perdagangan ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) dilakukan pada 24 agustus 2006 yang dapat dilihat pasca penandatanganan

¹⁴*Economic Development Cooperation Fund* (EDCF). Di akses melalui www.edcfkorea.go.kr pada 31-03-2017 pukul 20:50

kerjasama tersebut nilai ekspor terus meningkat juga diselingi nilai permintaan yang juga meningkat.

Dengan adanya skema *preferential tariff* dalam ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* untuk barang, secara jangka panjang manfaat tersebut dapat dilihat dari tren positif peningkatan aktivitas ekspor dalam hubungan perdagangan kedua negara. Berdasarkan analisis perbandingan kondisi dengan ASEAN-Korea *Free Trade Area* (AKFTA) dan hasil simulasi kondisi tanpa ASEAN-Korea *Free Trade Area* (AKFTA) selama periode pengamatan 1 Juli 2007 sampai dengan 31 Juni 2011, dapat diketahui bahwa skema tarif ASEAN-Korea *Free Trade Area* (AKFTA) telah memberikan dampak terhadap peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan rata-rata sebesar US\$ 1,154,777,480 per tahunnya. Dengan demikian adanya skema ASEAN-Korea *Free Trade Area* (AKFTA) memberikan dampak langsung melalui peningkatan nilai ekspor terhadap pendapatan nasional Indonesia sebesar rata-rata US\$ 1,154,777,480 per tahun.

Secara persentase, pertumbuhan nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan meningkat rata-rata sebesar 12,61% setiap tahunnya sebagai akibat dampak ASEAN-Korea *Free Trade Area* (AKFTA), yang berarti peningkatan sekitar 3 kali lipat dibandingkan bila Indonesia tidak mengikuti perjanjian perdagangan ASEAN-Korea *Free Trade Area* (AKFTA).

Berdasarkan dari meningkatnya nilai ekspor tersebut juga secara tidak langsung memicu peningkatan masuknya nilai investasi Korea Selatan ke Indonesia yang ditandai dengan keuntungan dari banyaknya investor dari Korea Selatan yang masuk dan menanamkan investasinya di Indonesia. Dengan kata lain investasi tersebut banyak membuka lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga dapat menekan angka pengangguran di Indonesia yang cukup signifikan.

Terbinanya hubungan ekonomi yang erat antara Indonesia dengan Korea Selatan selama bertahun-tahun di antara kedua negara, masyarakat Korea Selatan telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Investasi Korea Selatan di Indonesia terutama pada sektor industri elektronik, telekomunikasi, konstruksi, otomotif, pertambangan, migas, air bersih, perbankan dan perhotelan.

Pada tahun 2009-2011 terdapat investasi yang bernilai miliaran US dollar dari perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan seperti POSCO, Hankook Tire, Lotte Group dan Cheil Jedang Group di Indonesia. Hal tersebut membuktikan adanya kepercayaan yang tinggi dari para investor Korea Selatan kepada Indonesia. Keputusan investasi tersebut diikuti bukan hanya oleh perusahaan afiliasi dan perusahaan vendor dari perusahaan besar Korea Selatan, tetapi juga oleh perusahaan Korea Selatan lainnya. Dari segi peningkatan bantuan keuangan Indonesia juga memperoleh bantuan berupa pinjaman keuangan dengan syarat lunak yang digunakan untuk pembangunan. Dengan demikian, adanya pinjaman keuangan otomatis dapat meningkatkan keuangan Negara.

Kesepakatan bilateral Indonesia-Korea Selatan dalam kerangka *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) merupakan program kerjasama keuangan yang ditujukan untuk mendukung pembangunan di sektor industri dan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi Indonesia. Sehingga dengan kuatnya stabilitas ekonomi dalam negeri dapat memberikan efek positif dalam meningkatnya daya saing komoditas ekspor ke Korea Selatan dengan indikasi komoditas dan produk ekspor Indonesia mengalami kenaikan atau stabil di pangsa pasar. Ini menunjukkan bahwa produk Indonesia cukup kompetitif di pasar ASEAN untuk mendapatkan tempat di pangsa pasar Korea Selatan khususnya.

Dari kesimpulan di atas penulis menyimpulkan bahwa kerjasama *Free Trade Area* (FTA) dalam lingkup ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) yang melibatkan Indonesia berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, karena dalam hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan dari tahun ke tahun (2007-2011), kemudian meningkatnya investasi atau meningkatnya para investor dari Korea Selatan yang menanamkan modalnya di Indonesia, dan juga berdampak positif juga terhadap pembangunan Indonesia, karena dalam hal ini Korea Selatan telah memberikan dana bantuan keuangan untuk pembangunan Indonesia.

IV. Referensi

Jurnal:

- OH, Jeon – Soo (2014). Does ASEAN-Korea FTA Reduce Poverty In Laos, The Roles Of FDI and Trade Facilitation. (*Journal of Social and Development Sciences*) Vol 5, No 2
- Pohan, Khairana (2014). Diplomasi Kebudayaan Pemerintah Korea Selatan Dalam Penyebaran Hallyu Di Indonesia Tahun 2010-2012. (eJurnal Ilmu Hubungan Internasional) Vol 2, No 3
- Putri, Ray Fani Arning (2016). Pengaruh Infansi dan Nilai Tukar Terhadap Ekspor Indonesia Komoditi Tekstil dan Elektronika ke Korea Selatan. (*Jurnal Administrasi Bisnis*) Vol 35, No 1
- Rahim, Taufuq Abdul (2015). Perubahan Perdagangan Bebas ke Integrasi ASEAN. (*Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*) Vol 11, No 2
- Setiawan, Sigit (2012). Dampak Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN – Korea FTA (AKFTA) Terhadap Indonesia dan Korea Selatan. (*Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*) Vol 16, No1
- Buku:**
- Bn, Marbun. 1996. Kamus Politik. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Burchill, Scott and Linklater, Andrew.1996. *Theories of International Relations*.
- Holsti. K.J. 1998. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II*, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.
- Jackson, Robert dan Sorensen, Georg. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan edisi kelima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita, Koesnadi. 1997. *Administrasi Internasional*. Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung.
- Mas'oed, Mohtar dan Yoon, Yang Seung. 2004. *Politik Luar Negri Korea Selatan*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Mas'oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES. Jakarta.
- Moelino, Anton M.1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia

- Nugroho Heru.dkk, 2005. *Globalisasi dan Tantangan Daya Saing Indonesia*, Jakarta:LIPI Press, anggota Ikapi
- Plano, Jack C dkk. 1985. *Kamus Analisis Politik*. Jakarta:Rajawali pers.
- Raoukre, John T. 2001. *International Politics on The World Stage*. USA.
- Rumapea, Tumpal. 2010. *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- S, Amir M. 2004. *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*. Jakarta: PPM.
- S, Kaelan,M. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Salvatore, Dominick. 1992. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Surbakti, Ramlan.1987. *Metodologi Ilmu Politik*. Surabaya.
- Yang Seung-Yoon, 2005. *40 Tahun (1966-2005) Hubungan Indonesia-Korea Selatan*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Internet:**
- Arti Kata Dampak diakses melalui www.kbbi.web.id pada Tanggal 01 Desember 2016
- ASEAN-Korea FTA. Diakses melalui www.adb.org/sites/.../wp21-asean-korea-fta.pdf...Pada tanggal 29 November 2016
- ASEAN-Korea FTA. Diakses melalui www.aseanbriefing.comPada tanggal 29 November 2016
- Batubara di Indonesia. Di akses melalui <http://www.indonesia-investments.com> Pada tanggal 09 Maret 2017
- Buku Perkembangan Kerjasama ASEAN Di Sektor Industri. Diakses melalui www.kemenperin.go.id/.../Buku-Perkembangan-Kerjasama-ASEAN-di-S... Pada tanggal 29 November 2016
- Buku diplomasi Indonesia 2011 Pdf. Di akses melalui www.kemlu.go.id Pada tanggal 11Maret 2017
- Background of AKFTA. Di akses melalui <http://akfta.asean.org> Pada tanggal 11 Februari 2017
- Edited AKFTA. Diakses melalui www.asean.org Pada tanggal 29 November 2016
- Economic Development Cooperation Fund (EDCF)*. Di akses melalui www.edcfkorea.go.kr Pada tanggal 31 Maret 2017
- Free Trade Agreement. Diakses melalui www.kemenkeu.go.idPada tanggal 29 November 2016
- <https://www.bps.go.id/> Pada tanggal 01 Maret 2017
- <http://www.kemenperin.go.id> Pada tanggal 24 Maret 2017
- Kajian Pkbr Dampak AKFTA. Diakses melalui www.kemenkeu.go.idPada tanggal 29 November 2016
- Laporan akhir kajian optimalisasi perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan mitra dagang. Diakses melalui www.kemendag.go.id Pada 13 Maret 2017
- Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPM Tahun 2010. Di akses melalui

www.bkpm.go.id Pada tanggal 31
Maret 2017

<http://lotte.co.id> Pada tanggal 25 Maret
2017

Pengertian non-tarif. Di akses melalui
<http://www.ilmuekonomi.net> pada
tanggal 07 Februari 2017

<https://www.emis.com> Pada tanggal 27
Maret 2017

Perkembangan kerjasama ASEAN di
sektor industri (s.d. 2011) . Di akses
melalui www.kemenprin.go.id pada
tanggal 08 Maret 2017

Perkembangan Realisasi Investasi PMA
Berdasarkan Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM) Menurut
Negara 2015. Di akses melalui
<https://data.go.id/dataset/perkembangan-realisasi-investasi-pma>
pada tanggal 13 April 2017

Pendapat Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Nomor A13511 Tentang
Pengambilalihan Saham Perusahaan
Thainox Stainless Public Company
Limited INC. Oleh POSCO pdf.
Diakses melalui www.kppu.go.id
Pada tanggal 24 Maret 2017

[repository.beacukai.go.id/.../803a8f6987e5
00f44c3b35494a356be7-pmk-1...](http://repository.beacukai.go.id/.../803a8f6987e500f44c3b35494a356be7-pmk-1...)
Pada tanggal 28 November 2016

Selayang pandang tentang ASEAN. Di
akses melalui www.kemlu.go.id Pada
tanggal 04 Februari 2017

www.oecd.org/investment/.../46485511.pdf
Pada tanggal 29 November 2016

www.kemenkeu.go.id Pada tanggal 24
Maret 2017

www.kemendag.go.id Pada tanggal 24
Maret 2017

www.hankooktire.com/id/ Pada tanggal
24 Maret 2017

www.krakatauposco.co.id Pada tanggal 24
Maret 2017